

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdullah, Fauzi, *et al.*, 2000, *Mengubah Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Asih, Eka Putri, 2014, *Paham SJSN*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 1960, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Basil Blackwell, Oxford.
- Bertalanffy, Ludwig von, 1971, *General System Theory*, Foundation Development Application Penguin Books, Middlesex.
- BPJS Kesehatan, 2015, *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, Jakarta.
- Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas RI, 2015, *Pedoman dan Perencanaan Penganggaran Disabilitas*, Kementerian Bappenas, Jakarta.
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Fernando, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1986, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuller, Lon, 1971, *Morality of Law*, Yale University, New Heaven.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cetakan delapan, Kanisius, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta.

- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy*, PT Gramedia, Jakarta.
- Paul, Spicker, 1995, *Social Policy, Themes and Approaches*, Prentice-Hall, London.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rawls, John, (Terj. Uzair Fauzan, et al.), 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta.
- Shrode William A., dan Voich, 1974, *Organization and Managemen Basic System Concept*, Florida State University, Tlhassee.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Singarimbun dan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto dan Pamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soenarko, 2003, *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiono, 1994, *Methodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugono, Dendy, 2018, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Surakhmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Methodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Buku Ajar, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suseno, Frans Magnis, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Vollenhoven, Cornelis Van, 1891, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Warrasih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum*, Pustaka Magister, Semarang.

## **2. Artikel Jurnal**

Pawestri, Aprila, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perpektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2. 2017.

Ratnawati, Tri, "Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di Indonesia dimasa Transisi", dalam Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

## **3. Hasil Penelitian/Kertas Kebijakan**

Mleinek, Helene dan Michael Darvis, "Disability and Social Protection Indonesia", *Laporan Hasil Penelitian*, Bappenas RI dan GIZ, Jakarta, 2012.

Nainggolan, Yossa, dan Pokja Disabilitas untuk RPP Disabilitas, "Kertas Kebijakan RPP Kesejahteraan Sosial", *Makalah*, SAPDA, Yogyakarta, 2017.

Ro'fah, "Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Laporan Hasil Penelitian*, PLD UIN, Yogyakarta, 3 Agustus 2017.

Widadgdo, Maria Meiwita, "Asessment Inklusi Penyandang Disabilitas dalam BPJS Kesehatan", *Hasil Penelitian*, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 2014

Zakiah, *et al.*, "Penelitian Jaminan kesehatan Bagi Difabel", *Hasil Penelitian*, SAPDA-Handicap Internasional, Yogyakarta, 2010.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, "Pidato Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY Tahun 2017", *Naskah Pidato*, Yogyakarta, 16 Oktober 2017.

Mahkota, "Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas", *Makalah*, Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sosial dan Layanan Publik bagi Disabilitas, Yogyakarta, 3-4 November 2017.

Yuliastiwi, Vivi, “Sensus Penduduk 2010 oleh BPS RI, Kebijakan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”, *Makalah*, Seminar Penyusunan Agenda Riset Nasional untuk Kebijakan dan Program Inklusi Disabilitas, Kementerian Bappenas RI, Jakarta, 11 Desember 2016.

#### 4. Internet

Dinas Sosial DIY, “Data PMKS Penyandang Disabilitas Tahun 2017”, [dinsos.jogjaprov.go.id/download/data-pmks-penyandang-disabilitas-tahun-2017/](https://dinsos.jogjaprov.go.id/download/data-pmks-penyandang-disabilitas-tahun-2017/), diakses 8 Januari 2018.

Dinas Sosial DIY, “Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/download/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial/>, diakses 01 Maret 2018.

Dinas Sosial DIY, “Jenis-Jenis PMKS”, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/>, diakses 8 April 2018.

Editor Solider, Sebanyak 110 Keluarga dengan Difabel Berat Terima Bantuan ASPBD, <https://www.solider.id/2017/07/19/sebanyak-110-keluarga-dengan-difabel-berat-terima-bantuan-aspbd/>, diakses 12 Mei 2018.

Humas BPJS Kesehatan, “Menteri Dalam Negeri Apresiasi 4 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota “UHC dan Ingatkan Kembali Inpres 8 Tahun 2017”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/784/Menteri-Dalam-Negeri-Apresiasi-4-Provinsi-dan-120-KabupatenKota-UHC-dan-Ingatkan-Kembali-Inpres-8-tahun-2017>, diakses 24 Juni 2018.

Huzaini, Lutfi, Bapeljamkesos Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Pilah Jamkesus 2017*, diakses melalui email [lutfihuzaini.bb1@gmail.com](mailto:lutfihuzaini.bb1@gmail.com), dikirim 29 Agustus 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Urgensi”, <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 3 Juni 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “atur”, <https://kbbi.web.id/atur>, diakses 4 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “atur”, <https://kbbi.web.id/atur>, diakses 4 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kebijakan”, <https://kbbi.web.id/kebijakan>, diakses 4 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Publik”, <https://kbbi.web.id/publik>, diakses 4 Agustus 2018.

Pusdatin Kemsos, “Data Kemiskinan Penyandang Disabilitas RI 2011”,  
[www.kemsos.go.id/pusdatin](http://www.kemsos.go.id/pusdatin), diakses 11 Mei 2018.

Solihin, Akhmad, “Cara dan Ringkasan Mempromosikan Inklusi Sosial di Masyarakat”,  
<https://visiuniversal.blogspot.com/2016/08/cara-dan-ringkasan-mempromosikan.html>, diakses 7 Maret 2018.

Tickers 96, Penalaran Deduktif, <https://thekicker96.wordpress.com/penalaran-deduktif>, diakses 31 Juli 2018.

Widodo, “Desentralisasi Asimetris dari/dalam Negara Kesatuan”, [Http://triwidodoutamo.blogspot.com/2010/11/Desentralisasi-asimetris-dandalan.html](http://triwidodoutamo.blogspot.com/2010/11/Desentralisasi-asimetris-dandalan.html), diakses 5 September 2017.

World Health Organization, “World Health Survey 2002–2004”,  
<http://www.who.int/healthinfo/survei/en/>, diakses 10 mei 2018.

## **5. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4454).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5871).

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 65).

## **6. Dokumen Lain**

Dokumen Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial dan Kementerian Lainnya Terkait RUU Tentang Penyandang Disabilitas.

Endah, Kepala Bagian Kesra Biro Kesra Setda DIY, *Focus Group Discussion* Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 31 Mei 2018.

Rofah Makin, Ahli Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, Narasumber dalam *Focus Group Discussion* Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 31 Mei 2018.

Setya Adi, Komite Disabilitas, *Focus Group Discussion* Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 31 Mei 2018.

Siti Badriyah, Kepala BapelJamkesus DIY, *Focuss Group Discussion* Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 31 Mei 2018.

Subroto, Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas Dinas Sosial DIY, *Focuss Group Discussion* Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 31 Mei 2018.

Hasil Wawancara dengan Siti Badriyah sebagai Kepala BapelJamkesus DIY di Kantor BapelJamkesus DIY, 1 Agustus 2018.

SAPDA, Workshop Penyiapan RPP Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, 3-4 November 2017.